

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi yang semakin berkembang, persaingan pada dunia bisnis tidak dapat terlepas dengan banyaknya perusahaan yang sama-sama unggul di bidangnya, yang ditunjukkan oleh banyaknya jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sehingga hal tersebut menjadi faktor pemicu bagi perusahaan untuk selalu memberikan performa terbaik agar dapat bertahan di pasar global. Kinerja keuangan yang baik diperlukan bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan nilai perusahaan.

Menurut Suhendro (2018) kinerja keuangan merupakan penilaian terhadap kondisi perusahaan atas usaha manajemen dalam melaksanakan fungsinya dalam suatu periode. Kualitas kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dalam laporan keuangannya pada tahun tertentu, selain itu kinerja keuangan juga bisa dimanfaatkan sebagai pembandingan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, sehingga mampu mengetahui progres yang terjadi pada setiap tahunnya, untuk mengukur kinerja keuangan pada suatu perusahaan salah satunya yaitu dengan menghitung *Return on Assets* (ROA).

Return on Assets (ROA) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu (Kasmir, 2011:201). Semakin besar nilai rasio ROA maka kinerja keuangan perusahaan mengalami peningkatan karena *return*

menjadi semakin besar. Menghitung tingkat pengembalian atas asset sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan perusahaan merupakan salah satu metode yang berhasil untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2014). Perusahaan diharapkan dapat memaksimalkan kinerja keuangan dan operasionalnya dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Menurut Malik (2022) *Good Corporate Governance* merupakan pengelolaan perusahaan yang tepat dalam mengatur interaksi antara manajemen, pemegang saham, dewan komisaris, dan pemangku kepentingan. Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran atau kesetaraan merupakan prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik.

Mekanisme *Good Corporate Governance* dapat mengurangi terjadinya masalah keagenan (Sarafina & Saifi, 2017). Efektivitas perusahaan dapat ditingkatkan melalui penggunaan GCG dengan cara yang benar, sehingga dapat melaporkan kegiatan dengan baik kepada pemangku kepentingan melalui laporan keuangan (Puspita & Patuh, 2017). Pada penelitian ini, GCG diukur dengan “dewan komisaris independen, komite audit, dewan direksi, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial.”

Dewan komisaris independen merupakan orang yang tidak terlibat apapun dengan perusahaan (Fadilah, 2017). Dengan kata lain, dewan

komisaris independen dapat diartikan sebagai anggota dewan yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan manajemen perusahaan, kepemilikan saham, atau hubungan lain yang dapat menyebabkan mereka bertindak independen.

Peran Dewan komisaris independen yaitu berfungsi sebagai penyeimbang ketika proses pengambilan keputusan oleh dewan. Selain itu, dewan komisaris independen juga mempunyai tugas untuk mengarahkan strategi dan mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang diharapkan.

Pengawasan oleh dewan komisaris independen dapat dikatakan mampu dalam hal memecahkan masalah keagenan antara manajemen dengan pemilik, sehingga efektivitas dan efisiensi pengelolaan perusahaan dapat tercapai. Kinerja keuangan suatu perusahaan akan meningkat sebagai hasil dari tercapainya efektivitas dan efisiensi tersebut membuat tingkat laba yang dihasilkan semakin tinggi.

Pernyataan diatas diperkuat dengan penelitian Wendy & Harnida (2020); Ruslim & Santoso (2018); Khoirunnisa & Karina (2021); Rahmatika dkk. (2019); Bascin & Hermain (2022); dan Malik (2022) yang meneliti pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan, dengan hasil bahwa kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi oleh dewan komisaris independen.

Namun, hasil tersebut tidak konsisten dengan penelitian Asyriana & Maulana (2022); dan Gozali dkk. (2022) yang meneliti pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan, dengan hasil bahwa kinerja keuangan perusahaan tidak dipengaruhi oleh dewan komisaris

independen. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji kembali pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan, karena adanya perbedaan hasil yang tidak konsisten dari penelitian sebelumnya.

Selanjutnya komite audit, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (2016) dewan komisaris membentuk komite audit untuk menjalankan tanggung jawab pengelolaan dan pengawasan pada perusahaan. Selain itu, keberadaan komite audit juga dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen untuk menyelesaikan konflik yang terjadi pada perusahaan. Komite audit mempunyai tanggung jawab antara lain penelaah atas kebijakan akuntansi yang di adopsi suatu perusahaan, evaluasi *internal control*, penelaahan sistem pelaporan *external* dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.

Ketika kualitas audit dalam sebuah perusahaan membaik, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin tinggi, termasuk kinerja dari perusahaan tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian Wendy & Harnida (2020); Asyriana & Maulana (2022); Rahmatika dkk. (2019); dan Destiana & Muslih (2019) yang meneliti pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan, dengan hasil bahwa kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi oleh komite audit.

Pernyataan tersebut tidak konsisten dengan penelitian Ruslim & Santoso (2018); Khoirunnisa & Karina (2021); Gozali dkk. (2022); Bancin & Hermain (2022); dan Malik (2022) yang meneliti pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan, dengan hasil bahwa kinerja keuangan perusahaan tidak dipengaruhi oleh komite audit. Sehingga peneliti tertarik

untuk mengkaji kembali pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan, karena adanya perbedaan hasil yang tidak konsisten dari penelitian sebelumnya.

Kemudian dewan direksi, Malik (2022) mengungkapkan bahwa dewan direksi merupakan pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan dengan senantiasa memperhatikan kepentingan, tujuan, unit usaha, dan mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham. Dewan direksi memiliki peran dalam mengoptimalkan interaksi kepada pihak luar perbankan untuk melakukan proses penghimpunan serta penyaluran modal. Selain itu, arah kebijakan dan strategi perusahaan menjadi tanggung jawab dewan direksi (Sukandar, 2014).

Secara teoritis, semakin besar jumlah dewan direksi yang bertugas melakukan koordinasi dan operasional antar lini perusahaan, maka dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Pernyataan ini searah dengan penelitian yang dilakukan Khoirunnisa & Karina (2021); Bacin & Hermain (2022); dan Malik (2022) yang meneliti pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan, dengan hasil bahwa kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi oleh dewan direksi.

Hasil tersebut tidak konsisten dengan penelitian Wendy & Harnida (2020); dan Ruslim & Santoso (2018) yang meneliti pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan, dengan hasil bahwa kinerja keuangan perusahaan tidak dipengaruhi oleh dewan direksi. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji kembali pengaruh dewan direksi terhadap kinerja

keuangan, karena adanya perbedaan hasil yang tidak konsisten dari penelitian sebelumnya.

Sembiring (2020) mengartikan kepemilikan institusional sebagai proporsi saham beredar yang dimiliki oleh pihak institusi lain diluar perusahaan. Skala rasio yang membandingkan jumlah saham yang dimiliki investor institusional dengan total kepemilikan saham perusahaan dapat digunakan untuk menghitung kepemilikan institusional. Semakin tinggi tingkat kepemilikan akan menyebabkan tingkat pemantauan akan menjadi sangat ketat yang dilakukan oleh investor institusional sehingga mampu mencegah tindakan oportunistik yang dilakukan manajer. Selain itu kepemilikan institusional juga mempunyai peran yang fundamental untuk mencegah terjadinya perselisihan antara investor dengan manajer.

Semakin tinggi kepemilikan saham institusional akan mencegah pemborosan yang mungkin dilakukan oleh pihak manajemen, sehingga pemanfaatan asset perusahaan akan semakin efisien. Kinerja keuangan akan semakin meningkat seiringnya dengan besarnya kepemilikan institusional pada perusahaan. Hal tersebut selaras dengan penelitian Ruslim & Santoso (2018); dan Malik (2022) yang meneliti pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan, dengan hasil bahwa kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi oleh kepemilikan institusional.

Tetapi, pernyataan tersebut tidak konsisten dengan penelitian Wendy & Harnida (2020); Khoirunnisa & Karina (2021); Asyriana & Maulana (2022); Gozali dkk. (2022); dan Sembiring (2020) yang meneliti pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan, dengan hasil bahwa kinerja keuangan perusahaan tidak dipengaruhi oleh

kepemilikan institusional. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji kembali pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan, karena adanya perbedaan hasil yang tidak konsisten dari penelitian sebelumnya.

Penelitian ini mengembangkan penelitian terdahulu dari Khoirunnisa & Karina (2021) yang menganalisis mengenai “pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit, dan dewan direksi terhadap kinerja keuangan pada perusahaan BUMN yang tercatat pada BEI periode 2017-2019.” Dengan hasil penelitian yang membuktikan bahwa “kinerja keuangan pada perusahaan dipengaruhi oleh variabel dewan komisaris independen dan dewan direksi, sedangkan variabel komite audit dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh.”

Perbedaan antara penelitian ini dengan Khoirunnisa & Karina (2021) yaitu terletak pada penambahan variabel independen yaitu kepemilikan manajerial yang sekiranya berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan. Alasan penambahan variabel tersebut adalah karena menurut Basuki & Siregar (2017) besarnya kepemilikan saham manajemen dalam perusahaan secara langsung dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

Tingginya tingkat saham yang dimiliki manajerial dalam sebuah perusahaan akan membuat manajemen selaku pengelola akan berperan sama seperti pemangku kepentingan pemegang saham dalam hal meningkatkan kinerja keuangan. Pernyataan ini selaras dengan penelitian Sembiring (2020); Malik (2022); dan Destiana & Muslih (2019) yang

meneliti pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan, dengan hasil bahwa kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial.

Hasil pernyataan tersebut berbeda dengan penelitian Wendy & Harnida (2020); Ruslim & Santoso (2018); Asyriana & Maulana (2022); dan Gozali dkk. (2022) yang meneliti pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan, dengan hasil bahwa kinerja keuangan perusahaan tidak dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan, karena adanya hasil yang tidak konsisten dari penelitian sebelumnya.

Perbedaan selanjutnya yaitu terletak pada objek dan periode penelitian. Perusahaan perbankan dipilih sebagai objek dalam penelitian ini karena sektor perbankan merupakan sektor yang diharapkan mempunyai progres baik pada masa yang akan datang, dimana aktifitas penduduk Indonesia sendiri tidak terlepas dari dunia perbankan, sehingga perusahaan perbankan memiliki peran yang relatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Didukung dengan banyaknya kasus perbankan yang terjadi di Indonesia, diantaranya yaitu Bank Syariah Mandiri pada tahun 2018 yang melakukan penyaluran pembiayaan fiktif senilai Rp 1,1 triliun, dikatakan sebagai fiktif lantaran Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai pengajuan pembiayaan dari debitur tidak digunakan sesuai proposal ketika uang cair, bahkan terdapat indikasi pembiayaan yang cair digunakan untuk kepentingan pribadi, sebagai akibatnya banyak pihak

yang berfikir betapa pentingnya implementasi tata kelola perusahaan yang baik untuk keberlangsungan bisnis sebagai standar akuntabilitas dari suatu perusahaan.

Alasan periode penelitian ini menggunakan tahun pengamatan 2019-2021 karena pada tahun tersebut merupakan masa pandemi covid-19 yang menyebabkan pertumbuhan sektor ekonomi semakin terpuruk, akibatnya banyak perusahaan seperti perbankan yang berdampak mengalami perubahan pada laporan keuangannya antara sebelum pandemi dengan ketika pandemi, sehingga dapat mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan, hal tersebut salah satunya dikarenakan sektor perbankan mungkin tidak dapat menyalurkan kreditnya dengan lancar seperti biasanya sebelum terjadi pandemi. Berikut data kinerja keuangan perusahaan perbankan yang ditinjau dari pertumbuhan laba sebelum dan selama covid-19.



Sumber: Mayasari dkk. (2021)

Gambar 1.1 Pertumbuhan Laba Sebelum dan Sesudah Covid-19

Dalam penelitian Mayasari dkk. (2021) menyebutkan bahwasannya kinerja keuangan perusahaan perbankan ditinjau dari pertumbuhan laba pada masa pandemi mengalami penurunan

dibandingkan dengan pertumbuhan laba sebelum masa pandemi. Rata-rata pertumbuhan laba perusahaan perbankan sebelum pandemi dicatatkan sebesar 14,24%, pertumbuhan laba tertinggi dicatatkan oleh emiten PNB dengan nilai sebesar 23,85%, sedangkan pertumbuhan laba terendah dicatatkan oleh emiten BBTN dengan nilai pertumbuhan negatif sebesar -7,25%.

Pada saat pandemi, hampir seluruh perusahaan perbankan mengalami penurunan pertumbuhan laba yang cukup signifikan. Penurunan pertumbuhan laba paling besar dicatatkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (BBNI) dengan nilai sebesar -78,59%, sedangkan yang mampu mencatatkan pertumbuhan laba positif yaitu PT. Bank Tabungan Negara, Tbk (BBTN) dengan nilai sebesar 665,71%.

Berlandaskan latar belakang yang telah disampaikan, penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021.”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian ini, sehingga dapat diambil rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. bagaimana pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan?
2. bagaimana pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan?
3. bagaimana pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan?

4. bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan?
5. bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan?

1.3 Batasan Masalah

Mengingat dalam pelaksanaan penelitian terdapat berbagai hal yang bersifat terbatas seperti waktu, ruang, dan materi sehingga diberikan batasan dalam penelitian ini yakni terbatas pada pengetahuan berkenaan dengan “pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, dewan direksi, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan
2. untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan
3. untuk mengetahui pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan
4. untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan
5. untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk beberapa aspek yaitu antar lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat dalam hal memberikan tambahan berupa ilmu pengetahuan serta wawasan penulis berkaitan dengan “pengaruh dewan komisaris independen, komite audit, dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021.”

2. Manfaat Bagi Perusahaan

diharapkan penelitian ini bisa memberikan motivasi perusahaan dalam meningkatkan *Good Corporate Governance*, agar dapat menyajikan *financial statements* yang berintegritas.

3. Manfaat Bagi Para Pengguna

Penulis berharap riset ini bisa di manfaatkan pihak luar khususnya kreditor dan investor dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait beberapa unsur yang berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

4. Manfaat Bagi Pembuat Kebijakan

Harapannya hasil penelitian ini dapat memberikan pertimbangan atau referensi bagi pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dapat lebih memperhatikan terkait penerapan dan peningkatan *Good Corporate Governance*.